

***RENCANA KERJA PERUBAHAN  
(RENJA-P SKPD)  
KECAMATAN JUAI TAHUN 2022***



***PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN JUAI  
TAHUN ANGGARAN 2022***

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2022 dapat dibuat. Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2022 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 8 Thn2008.

Pembuatan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Juai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Pembuatan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2022 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan RENJA ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan SKPD dimasa yang akan datang.

Juai, Agustus 2022  
Camat Juai,  
  
**NANANG EDWARD, S.Sos., MM.**  
NIP. 19880212 201001 2 016



## DAFTAR ISI

<b><i>KATA PENGANTAR</i></b> .....	<b><i>i</i></b>
<b><i>DAFTAR ISI</i></b> .....	<b><i>ii</i></b>
<b><i>BAB I PENDAHULUAN</i></b> .....	<b><i>1</i></b>
1.1. Latar Belakang.....	<b><i>1</i></b>
1.2. Tujuan.....	<b><i>2</i></b>
1.3. Landasan Hukum.....	<b><i>5</i></b>
1.4. Sistematika Penulisan.....	<b><i>7</i></b>
<b><i>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022</i></b> .....	<b><i>9</i></b>
2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan.....	<b><i>9</i></b>
2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota.....	<b><i>10</i></b>
2.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .....	<b><i>19</i></b>
2.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .....	<b><i>20</i></b>
2.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	<b><i>21</i></b>
2.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum .....	<b><i>22</i></b>
2.1.6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .....	<b><i>23</i></b>
2.2 Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi.....	<b><i>33</i></b>
<b><i>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2022</i></b> .....	<b><i>40</i></b>
<b><i>BAB IV PENUTUP</i></b> .....	<b><i>48</i></b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan SKPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang deponitif. Dalam penyusunannya dilakukan dalam dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
- b. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

## **1.2. Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2022 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Juai dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai dimulai dari usulan setiap Seksi dan juga dari Sekretariat atau PPTK, kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Juai untuk menentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan. Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Juai menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian IKU Kantor Kecamatan Juai sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini.

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan bulan Juni  
Tahun 2022 Kecamatan Juai**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,55	87,56	100,01%
Meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan	Skor IDM desa	0,6389	0,6693	104,76%

Perolehan nilai realisasi sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 87,56 diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Umum kepada 25 responden yang membutuhkan pelayanan pada kantor Kecamatan Juai per semester pertama tahun 2022. Sedangkan hasil realisasi untuk sasaran meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan diperoleh dari rata-rata nilai skor IDM 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Juai tahun 2021 yang dirilis pada tanggal 12 Mei 2022 dimana hasilnya mencapai nilai skor rata-rata 0,6693.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Kecamatan Juai sampai dengan semester I Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkriteria sangat baik, dengan capaian sebesar 100,01%, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Formula Perhitungan		
Total Nilai IKM yang dicapai	X	100%
----- Target IKM		

Adapun Program dan kegiatan prioritas yang mendukung sasaran IKU meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

**Tabel Program Pendukung IKU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No	Program	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116.107.300	60.391.100	52,01%	12 bulan	6 bulan	50%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.762.760.	1.309.148.	47,39%	66,50	65,66	98,74%
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	43.200.000	20.400.000	47,22%	100%	100%	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	222.035.000	114.403.000	51,52%	100%	15%	15%

Sedangkan untuk capaian IKU Kecamatan Juai tentang meningkatnya kualitas kemandirian desa sebagaimana yang telah disampaikan di atas mencapai angka capaian

sebesar 0,6693 dari target sebesar 0,6389 atau sekitar 104,76%. program dan kegiatan prioritas yang mendukung sasaran IKU meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan terdapat pada 2 (dua) program sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. 1**  
**Tabel Program Pendukung IKU Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan**

No	Program	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.897.200	10.237.200	93,94	100%	100%	100%
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	323.609.600	164.849.800	50,94%	100%	50%	50%

### **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Juai Tahun 2022 mengacu pada landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  7. Permendagri No.54 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No.8 Thn 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  8. Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2017
  9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2016 tentang

Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah.
15. PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021.
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25)

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II LAPORAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

2.2 Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi

## BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

3.1 Rancangan Rencana Kerja Perubahan

## BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai diukur berdasarkan target yang dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Kecamatan Juai Tahun 2022, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Juai 2021-2026.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2022 per Semester II Kecamatan Juai melaksanakan 6 (enam) program yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 3.478.609.352,- dan serapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2022 mencapai 48,28 % atau sebesar Rp. 1.679.429.726,-.

#### **2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan**

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Juai per semester I tahun 2022 Kecamatan Juai perlu dilakukan evaluasi atas capaian kinerja dan keuangan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenang Kecamatan Juai tahun 2022. Berikut disampaikan penjelasan terperinci atas ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Juai semester 1 tahun 2022.

## **2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota**

### **2.1.1.1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**

#### **a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

- Tujuan : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pada Kantor Kecamatan Juai

- Output : Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD

- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 0%

Realisasi fisik kegiatan adalah berupa dokumen renja 2023 dan dokumen renja perubahan 2022 sedangkan terhitung sampai dengan juni 2022, kedua dokumen tersebut belum selesai disusun.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 38,45 %

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 38.390.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp.14.760.000,00

#### **b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD**

- Tujuan : penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD Kecamatan Juai

- Output : Jumlah dokumen RKA dan DPA

- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 0 %

Realisasi fisik kegiatan berupa dokumen RKA 2023 dan dokumen RKA

Perubahan 2022 sedangkan terhitung sampai dengan semester I tahun 2022, kedua dokumen tersebut belum selesai disusun dan disahkan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 92,68%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.3.066.700,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.842.100,00

c. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Tujuan : Terlaksananya penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

- Output : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 50 %

Realisasi fisik kinerja kegiatan adalah penyusunan laporan kinerja (LKIP) dan laporan pertanggungjawaban (LKPj) Kecamatan Juai. Adapun laporan yang telah terealisasi adalah laporan LKPj sedangkan laporan kinerja (LKIP) telah selesai disusun namun belum rilis hasil penilaiannya sehingga tidak dapat dinyatakan telah terealisasi.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 56,23%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.5.140.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar

Rp.2.890.000,00

### **2.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

#### **a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- Output : Cakupan pembayaran gaji dan tunjangan
- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 50 %

Realisasi fisik kinerja kegiatan adalah berupa jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dimana target capaian adalah sebanyak 12 (dua belas) bulan sedangkan realisasi sampai bulan juni 2022 adalah sebesar 6 (enam) bulan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 48,73%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 2.284.944.152,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.113.395.129,00

#### **b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD**

- Tujuan : Terlaksananya pembayaran honorarium sesuai dengan beban kerja.
- Output : Cakupan waktu pembayaran honorarium sesuai dengan beban kerja
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50 %

Realisasi fisik kinerja kegiatan ini adalah jumlah bulan waktu pembayaran gaji honorarium tenaga honor lepas (THL) yang bertugas membantu

pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD di Kecamatan Juai dimana sampai dengan bulan Juni 2022 telah terealisasi 6 (enam) bulan dari target 12 (dua belas) bulan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 48,67%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 72.742.600,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 35.402.800,00

### **2.1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

#### **a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan**

- Tujuan : Terlaksananya keikutsertaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Output : Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 60 %

Realisasi fisik kinerja sub kegiatan tersebut di atas adalah jumlah ASN yang ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dimana per semester I tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 9 (sembilan) orang atau kali keikutsertaan ASN Kecamatan Juai dalam pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga penyelenggara bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.



- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 36,42%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 46.320.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 16.870.000,00

#### **2.1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

##### **a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Kecamatan Juai
- Output : Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50%

Realisasi fisik dari kinerja sub kegiatan tersebut di atas adalah cakupan waktu tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Juai dimana target tahun 2022 adalah 12 (dua belas) bulan dan telah terealisasi 6 (enam) bulan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 31,84%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 6.270.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.996.500,00

##### **b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
- Output : Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 16%  
Realisasi fisik kegiatan yang dimaksud adalah terlaksananya penyediaan 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 10.000.000,- dari target realisasi pagu sebanyak Rp. 61.500.000,- yang digunakan juga untuk pengadaan AC (air conditioner), meja dan kursi kerja.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 16,26%  
Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 61.500.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 10.000.000,00

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Output : Cakupan waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50%  
Realisasi fisik kinerja sub kegiatan tersebut berupa cakupan waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang telah terealisasi sebanyak 6 (enam) bulan dari target 12 (dua belas) bulan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 49,3%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 28.399.800,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 14.000.000,00

d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Tujuan : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
- Output : cakupan waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50% atau terealisasi sebanyak 6 (enam) bulan dari target 12 (dua belas) bulan
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 8,06%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 39.886.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.215.000,00

#### **2.1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa surat menyurat

- Tujuan : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
- Output : Cakupan waktu pelayanan administrasi perkantoran
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50% atau 6 (enam) bulan dari target 12 (dua belas) bulan

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 45,83%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 7.200.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.300.000,00

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Output : Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50 % atau 6 (enam) bulan dari target 12 (dua belas) bulan

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 42,69%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 80.800.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 34.497.097,00

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Output : Cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50% atau 6 (enam) bulan dari

target 12 (dua belas) bulan

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 64,89%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 9.000.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.840.000,00

#### **2.1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- Tujuan : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Output : Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50% atau 6 (enam) bulan dari target 12 (dua belas) bulan

Realisasi fisik kegiatan tersebut direalisasikan dari cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berupa service mobil dinas, penyediaan bahan bakar minyak, ganti oli dan pembayaran pajak kendaraan dinas.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 75,07%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 36.750.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar

Rp. 27.589.000,00

b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

- Tujuan : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
- Output : Cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50% atau 6 (enam) bulan dari target 12 (dua belas) bulan

Realisasi fisik kegiatan tersebut di atas adalah pembayaran honorarium penjaga malam dan security atau satpam yang bertugas menjaga keamanan gedung kantor Kecamatan Juai.

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50% atau 6 (enam) bulan dari target 12 (dua belas) bulan
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 53,25%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 42.351.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 22.551.000,00

## **2.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

### **2.1.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

- Tujuan : Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

- Output : Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50%

Realisasi dari sub kegiatan tersebut di atas dilihat/dihitung dari pelaksanaan layanan yang dilaksanakan Kecamatan Juai terhadap masyarakat khususnya yang dilakukan melalui seksi pelayanan publik. Sampai dengan bulan juni 2022 telah direalisasikan sebanyak 6 (enam) bulan atau 50% pelayanan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 52,01%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.116.107.300,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 60.391.100,00

### **2.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

#### **2.1.3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

- Tujuan : Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- Output : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) kegiatan

Realisasi dari sub kegiatan tersebut di atas dilihat/dihitung dari pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai khususnya yang dilakukan melalui Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Juai. Adapun kegiatan yang dimaksud dan terakomodir anggarannya adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa melalui pelaksanaan dan pembinaan lomba desa.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 93,94%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.10.897.200,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 10.237.100,00

#### **2.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

##### **2.1.4.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Tujuan : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Output : Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan

- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) kegiatan

Realisasi dari sub kegiatan tersebut di atas dilihat/dihitung dari pelaksanaan 1 (satu) kegiatan forum komunikasi camat bersama perkopimcam atau lintas sektor di wilayah Kecamatan Juai yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pencapaian target tujuan Kecamatan Juai.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 47,22%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.43.200.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 20.400.000,00



## **2.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

### **2.1.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala**

#### **Daerah**

- a. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
  - Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
  - Output : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 10% atau terealisasi persiapan pelaksanaan kegiatan saja.

Realisasi dari sub kegiatan tersebut di atas dilihat/dihitung dari pelaksanaan 4 (empat) kegiatan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal seperti keikutsertaan perwakilan MTQ, perayaan 17 agustus, pelaksanaan renungan suci, dan haul datu kandang haji. Terhitung sampai akhir semester I tahun 2022 keempat kegiatan tersebut belum dilaksanakan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 51,52%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.222.035.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar

Rp.114.403.000,00

## **2.1.6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

### **2.1.6.1 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

#### **a. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa**

- Tujuan : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- Output : Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50%.

Realisasi dari sub kegiatan tersebut di atas dilihat/dihitung dari pelaksanaan fasilitasi kecamatan juai atas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa pada 21 (dua puluh satu) desa di lingkup Kecamatan Juai. Penyajian laporan atas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa yang dilakukan setiap bulan dan per triwulan telah difasilitasi oleh kecamatan juai melalui seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa selama 6 (enam) bulan atau 50% dari keharusan fasilitasi desa selama 1 (satu) tahun.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 84,57%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 53.519.800,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp.45.260.000,00

#### **b. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa**

- Tujuan : Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- Output : Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50%.

Realisasi dari sub kegiatan tersebut di atas pembayaran atas insentif pejabat RT di 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Juai dan fasilitasi atas pelaksanaan tugasnya dalam penyelesaian administrasi pemerintahan di desa. Sampai dengan akhir semester 1 tahun 2022 telah difasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa melalui monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh aparatur desa termasuk pejabat RT di desa.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 41,67%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 258.000.000,00 sedangkan Realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp.107.500.000,00

c. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

- Tujuan : Terlaksananya fasilitasi desa untuk menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu
- Output : Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100%.

Realisasi dari sub kegiatan tersebut di atas adalah pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan Juai dimana tugas Kecamatan Juai untuk memfasilitasi

desa mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil musrenbang tingkat Kecamatan Juai hingga fasilitasi akomodir usulan oleh SKPD terkait usulan musrenbang.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 100%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 10.089.800,00 dan telah terealisasi seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa tingkat pencapaian target kinerja seluruh sub kegiatan berada pada nilai sekitar 51,18% dan capaian target keuangan sekitar 48,28%. Meskipun dalam peringkat rendah jika dibandingkan dengan pencapaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun namun untuk perhitungan periode semester pertama, capaian tersebut telah mencapai predikat tinggi. Hal ini di dorong dengan adanya faktor pendorong berupa jenis indikator setiap kegiatan yang berupa persentase dan cakupan waktu penyediaan layanan/pelaksanaan kegiatan yang berjumlah 12 (dua belas) bulan. Sedangkan faktor penghambat dari capaian target semester pertama adalah terdapat belanja modal pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan kesalahan dalam penentuan harga satuan yang tidak sesuai dengan harga pasar dan perlu dilakukan pergeseran anggaran di anggaran perubahan tahun 2022. Laporan capaian kinerja dan keuangan sampai semester I tahun 2022 dapat dilihat lebih jelas pada tabel hasil evaluasi renja Kecamatan Juai triwulan II Tahun 2022 di bawah ini.

**FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JUAI**  
**TRIWULAN II TAHUN 2022**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp			K	Rp		
				8	9	10	11	12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100												
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai Output)	68,65 nilai	21.248.004,227	65,66 nilai	2.569.818,032	66,5 nilai	2.762.760,252	65,66 nilai	677.778,189	65,66 nilai	1.309.148,626					65,66 nilai	1.309.148,626	98,74	47,39	65,66 nilai	1.309.148,626,00	95,64	6,16	
	7.01.01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	36 dokumen	322.180,725	6 dokumen	46.140,000	6 dokumen	46.596,700	1 dokumen	7.500,000	1 dokumen	20.492,100					1 dokumen	20.492,100	16,67	43,98	7 dokumen	66.632,100,00	19,44	20,68	
1	7.01.01.2.0.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	12 dokumen	258.858,715	2 dokumen	46.140,000	2 dokumen	38.390,000	0 dokumen	7.500,000	0 dokumen	14.760,000					0 dokumen	14.760,000	0,00	38,50	2 dokumen	60.900,000,00	16,67	23,53	KECA MATA N JUAI
2	7.01.01.2.0.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DA	Jumlah dokumen RKA dan DA	12 dokumen	23.663,775	2 dokumen	0	2 dokumen	3.066,700	0 dokumen	0	0 dokumen	2.842,100					0 dokumen	2.842,100	0,00	92,68	2 dokumen	2.842,100,00	16,67	12,01	KECA MATA N JUAI
3	7.01.01.2.0.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	12 dokumen	39.658,235	2 dokumen	0	2 dokumen	5.140,000	1 dokumen	0	1 dokumen	2.890,000					1 dokumen	2.890,000	50,00	56,23	3 dokumen	2.890,000,00	25,00	7,29	KECA MATA N JUAI
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)</b>																16,67	62,44			19,44	14,29					
<b>Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)</b>																S	Re			S	S					
	7.01.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	72 Bulan	18.489.579,784	12 Bulan	2.250.967,908	12 Bulan	2.357.686,752	3 Bulan	591.408,816	6 Bulan	1.148.797,929					6 Bulan	1.148.797,929	50,00	48,73	18 Bulan	3.399.765,837,00	25,00	18,39	
4	7.01.01.2.0.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan waktu pembayaran gaji dan tunjangan	72 Bulan	18.050.515,282	12 Bulan	1.915.687,908	12 Bulan	2.284.944,152	3 Bulan	571.846,016	6 Bulan	1.113.395,129					6 Bulan	1.113.395,129	50,00	48,73	18 Bulan	3.029.083,037,00	25,00	16,78	KECA MATA N JUAI

5	7.01.01.2.0.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Cakupan waktu pembayaran honorarium	72 Bulan	439.064.502	12 Bulan	335.280.000	12 Bulan	72.742.600	3 Bulan	19.562.800	6 Bulan	35.402.800					6 Bulan	35.402.800	50,00	48,67	18 Bulan	370.682.800,00	25,00	84,43	KECAMATAN JUAI
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																				50,00	48,67			25,00	50,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																				Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik	Sangat Baik	
6	7.01.01.2.0.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	72 bulan Orang/perjalanan	326.788.232	12 bulan	44.000.000	12 bulan	46.320.000	3 bulan	16.870.000	6 bulan	16.870.000					6 bulan	16.870.000	60,00	36,42	24 Orang/perjalanan	60.870.000,00	26,57	18,63	KECAMATAN JUAI
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																				60,00	36,42			26,57	18,63	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																				Rendah	Sangat Baik			Sangat Baik	Sangat Baik	
7	7.01.01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 Bulan	1.197.439.523	12 Bulan	75.817.408	12 Bulan	136.055.800	3 Bulan	7.400.000	6 Bulan	29.211.500					6 Bulan	29.211.500	50,00	21,47	18 Bulan	105.028.908,00	25,00	8,77	
<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub</b>	<b>Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah</b>		<b>Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)</b>		<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi</b>		<b>Realisasi Kinerja Pada Triwulan</b>				<b>Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi</b>				<b>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah</b>	<b>Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022</b>		<b>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah</b>		<b>Unit Perangkat Daerah Penanggung</b>			
1	2	3	4	5		6		7		8				12				13=12/7x100	14=6+12		15=14/5x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	7.01.01.2.0.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	72 Bulan	48.376.874	12 Bulan	6.267.500	12 Bulan	6.270.000	3 Bulan	0	6 Bulan	1.996.500					6 Bulan	1.996.500	50,00	31,84	18 Bulan	8.264.000,00	25,00	17,08	KECAMATAN JUAI
8	7.01.01.2.0.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan	100 %	407.345.629	100 %	13.500.000	100 %	61.500.000	0 %	0	16 %	10.000.000					16 %	10.000.000	16,00	16,26	16 %	10.000,00	16,00	2,45	KECAMATAN JUAI
9	7.01.01.2.0.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan waktu penyediaan barang	72 Bulan	168.200.296	12 Bulan	11.570.500	12 Bulan	28.399.800	3 Bulan	7.400.000	6 Bulan	14.000.000					6 Bulan	14.000.000	50,00	49,30	18 Bulan	25.570.500,00	25,00	15,20	KECAMATAN JUAI



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase PATEN yang terlayani sesuai	100 %	760.168.901	100 %	67.878.500	100 %	116.107.300	25 %	33.348.300	50 %	60.391.100					50 %	60.391.100	50,00	52,01	50 %	60.391.100,00	50,00	7,94	
1	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Daerah	Persentase PATEN yang terlayani sesuai	100 %	760.168.901	100 %	67.878.500	100 %	116.107.300	25 %	33.348.300	50 %	60.391.100					50 %	60.391.100	50,00	52,01	50 %	60.391.100,00	50,00	7,94	
16	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Persentase pelaksanaan pelayanan	100 %	760.168.901	100 %	67.878.500	100 %	116.107.300	25 %	33.348.300	50 %	60.391.100					50 %	60.391.100	50,00	52,01	50 %	60.391.100,00	50,00	7,94	KECAMATAN JUAI
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												50,00	52,01			50,00	7,94					
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)												S	Re			S	S					
				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)												50,00	52,01			50,00	7,94					
				Predikat Kinerja (Kegiatan)												S	Re			S	S					
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang	100 %	84.080.860	100 %	0	100 %	10.897.200	10 %	8.197.200	100 %	10.237.200					100 %	10.237.200	10,00	93,94	100 %	10.237.200,00	10,00	12,18	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan	100 %	84.080.860	100 %	0	100 %	10.897.200	10 %	8.197.200	100 %	10.237.200					100 %	10.237.200	10,00	93,94	100 %	10.237.200,00	10,00	12,18	
17	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah kegiatan pemberdayaan	6 kegiatan	84.080.860	1 kegiatan	0	1 kegiatan	10.897.200	0 kegiatan	8.197.200	1 kegiatan	10.237.200					1 kegiatan	10.237.200	10,00	93,94	2 kegiatan	10.237.200,00	33,33	12,18	KECAMATAN JUAI
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												10,00	93,94			33,33	12,18					
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)												S	S			S	S					
				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)												10,00	93,94			10,00	12,18					
				Predikat Kinerja (Kegiatan)												S	S			S	S					



4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban	100 %	348.591.259	100 %	0	100 %	43.200.000	13 %	9.900.000	100 %	20.400.000					100 %	20.400.000	10,000	47,22	100 %	20.400.000	10,000	5,85		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan	100 %	348.591.259	100 %	0	100 %	43.200.000	13 %	9.900.000	100 %	20.400.000					100 %	20.400.000	10,000	47,22	100 %	20.400.000	10,000	5,85		
18	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan	6 kegiatan	348.591.259	1 kegiatan	0	1 kegiatan	43.200.000	0 kegiatan	9.900.000	1 kegiatan	20.400.000					1 kegiatan	20.400.000	10,000	47,22	2 kegiatan	20.400.000	33,33	5,85	KECAMATAN JUAI	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																				10,00	47,22			33,33	5,85		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																				S	S			S	S		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																				10,00	47,22			33,33	5,85		
Predikat Kinerja (Kegiatan)																				S	S			S	S		
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi	100 %	1.536.988.090	100 %	76.184.000	100 %	222.035.000	10 %	17.160.000	15 %	114.403.000					15 %	114.403.000	15,000	51,52	15 %	114.403.000	15,000	7,44		
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	Rp	13=12/7x100	K	Rp		14=6+12	K	Rp	15=14/5x100		
1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuhangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai	100 %	1.536.988.090	100 %	76.184.000	100 %	222.035.000	10 %	17.160.000	0 %	114.403.000					10 %	114.403.000	10,000	51,52	10 %	114.403.000	10,000	7,44		





## 2.2 Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi

Setiap perencanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah daerah akan selalu berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bentuk dari hasil pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berikut adalah analisis dampak sosial dan ekonomi atas pelaksanaan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan pada Kecamatan Juai Tahun 2022 :

### 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berdampak terhadap sosial masyarakat dikarenakan perencanaan perangkat daerah penting untuk dilaksanakan untuk merencanakan penganggaran terhadap seluruh kegiatan pelayanan publik dimana masyarakat selaku penerima manfaat layanannya.

### 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Demikian pula halnya dengan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD. Ketika dokumen perencanaan Kecamatan Juai telah di susun maka langkah berikutnya adalah penyusunan dokumen anggaran atau RKA SKPD. Dengan adanya dokumen anggaran berupa RKA SKPD maka kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan lancar dikarenakan adanya dukungan pendanaan atas kegiatan tersebut oleh pemerintah. Hal itu pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Juai terhadap masyarakat

### 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD memungkinkan bagi masyarakat untuk memonitoring penggunaan dana APBD yang salah satu sumbernya adalah pajak yang dibayar oleh masyarakat. Laporan tersebut juga diunggah secara daring agar dapat diakses oleh masyarakat.

### 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi hak ASN selaku abdi masyarakat.

Dengan terpenuhinya hak ASN sebagai peningkatan kesejahteraan ASN yang bersangkutan maka ASN tersebut dapat bekerja dengan maksimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi ASN dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan daerah yang baik dan benar sehingga pendayagunaan kedua sumber daya tersebut dilaporkan kepada masyarakat dengan benar dan mudah diakses.

6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia ASN pemerintah daerah Kabupaten Balangan selaku pengabdian masyarakat yang harus memberikan pelayanan publik secara optimal.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan kebutuhan kantor berupa komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tentunya penting untuk menunjang pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Pelayanan publik yang optimal akan berdampak baik ke kehidupan sosial masyarakat.

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertujuan untuk menyediakan seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakan ASN demi kelancaran pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Meski tidak berdampak langsung kepada sosial masyarakat namun hal tersebut juga berkontribusi terhadap lancarnya pelayanan publik.

9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan dilaksanakan untuk menyediakan bahan untuk mencetak dan menggandakan berkas pelayanan pemerintah daerah. Dengan bahan persiapan pelaksanaan pelayanan publik yang

lengkap tentunya akan mendukung pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

#### 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sama halnya dengan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor maka sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD juga tidak berdampak langsung dengan masyarakat namun harus disediakan pendanaan dan pelaksanaan kegiatannya agar memudahkan ASN dalam memfasilitasi penyelesaian pelayanan publik kepada masyarakat.

#### 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pelaksanaan manajemen surat masuk dan keluar pada instansi pemerintah wajib dikelola dengan baik dan benar untuk memudahkan ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika seluruh dokumen fisik terkelola dengan baik maka memudahkan ASN dalam menyelesaikan dokumen-dokumen pelayanan publik yang dibutuhkan.

#### 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bertujuan menyediakan pendanaan untuk kebutuhan listrik, air dan telepon/internet pemerintahan daerah yang walaupun tidak berdampak langsung terhadap masyarakat namun wajib dipenuhi demi kelancaran pelaksanaan pelayanan publik.

#### 13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dana perbaikan atas peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. Dengan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor maka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh ASN lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

#### 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan tersedianya pendanaan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

maka aset pemerintah daerah tersebut akan terpelihara dengan baik dan memberi manfaat yang lebih lama bagi ASN dalam melaksanakan pelayanan publik.

15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Demikian pula halnya dengan anggaran pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sama maksud dan tujuannya dengan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Meski tidak berdampak langsung terhadap sosial masyarakat namun tetap berkontribusi dalam mendukung kegiatan peningkatan kualitas hasil pelayanan kepada masyarakat.

16. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Dalam sub kegiatan ini disediakan pendanaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Juai seperti penyediaan makanan minuman pelayanan publik, penyediaan bahan penyelenggaraan pelayanan publik dan penyusunan laporan monev hasil pelayanan publik.

17. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah Kecamatan Juai. Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pendampingan desa yang mengikuti lomba desa tingkat Kabupaten Balangan. Dengan adanya pembinaan pemberdayaan masyarakat maka akan mendorong peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat desa tersebut melalui pembinaan di seluruh aspek layanan desa. Kecamatan Juai lebih pro aktif dalam fasilitasi pembinaan dan pendampingan desa yang mengikuti lomba desa, baik koordinasi di lingkup Kecamatan Juai maupun dengan SKPD terkait di Kabupaten Balangan.

18. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan sub kegiatan ini sangat penting dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Juai khususnya karena dengan terlaksananya

sinergitas dengan instansi lintas sektor di sekitar pemerintah daerah Kecamatan Juai maka akan menciptakan lingkungan kehidupan yang aman dan kondusif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut.

19. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Bukan hanya kebutuhan fisik masyarakat yang harus dipenuhi, namun juga kebutuhan batin masyarakat juga perlu dipenuhi. Lingkungan Kecamatan Juai dapat diasumsikan lebih istimewa dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Balangan karena di Kecamatan Juai terdapat tempat wisata religius seperti makam datu kandang haji dan makam pahlawan dimana setiap tahun terdapat agenda yang harus dilaksanakan untuk memperingati kedua makam tersebut. Kecamatan Juai bertugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam acara peringatan di kedua tempat tersebut dan mengkoordinasikannya dengan instansi-instansi terkait di luar Kecamatan Juai

20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sub kegiatan ini menyediakan dana bagi ASN Kecamatan Juai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa di 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Juai. Dengan tertibnya administrasi desa dalam mengelola keuangan dan pendayagunaan aset desa maka diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan desa tersebut.

21. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, termasuk di dalamnya tugas pejabat RT di desa berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat di desa karena semua urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik oleh masyarakat langsung bersinggungan dengan perangkat desa khususnya pejabat RT. Sub kegiatan ini menyediakan dana untuk pembayaran insentif pejabat RT sehingga terjamin terpenuhi hak kesejahteraan pejabat dimaksud.

22. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif



Sub kegiatan ini bertujuan menyediakan dana pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan sekaligus pendampingan atas pelaksanaan musrenbang desa dimana hasil dari musrenbang langsung berdampak baik aspek sosial maupun ekonomi tergantung dari jenis usulan musrenbang yang diakomodir pemerintah daerah Kabupaten Balangan maupun yang difasilitasi pengusulannya ke pemerintah provinsi/pusat.

Selain analisis dampak sosial dan ekonomi terhadap anggaran sub kegiatan yang diampu oleh Kecamatan Juai tahun 2022, juga terdapat analisis atas dampak sosial dan ekonomi atas beberapa kebijakan di luar anggaran yang tersedia seperti penyediaan layanan samsat bantu juai dan layanan restorative justice Kecamatan Juai. Layanan samsat bantu juai merupakan upaya peningkatan layanan publik Kecamatan Juai dimana sebelum pelaksanaan layanan samsat dilakukan melalui mobil samsat keliling yang hadir memberikan layanan samsat setiap hari selasa di halaman kantor Kecamatan Juai. Dengan disediakannya satu ruangan di kantor Kecamatan Juai untuk keperluan samsat bantu juai maka penyediaan layanan samsat bisa dilakukan setiap hari dari hari senin sampai dengan jumat pada saat jam kerja. Tentunya dengan adanya samsat bantu juai berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Juai yaitu kemudahan mengakses layanan samsat setiap hari kerja dan lancarnya layanan pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara sebagai salah satu PAD yang berasal dari masyarakat Kecamatan Juai. Sedangkan kebijakan pembentukan ruang restorative justice di kantor Kecamatan Juai dan seluruh desa di Kecamatan Juai bertujuan untuk membantu masyarakat untuk menerima layanan penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan yang dilaksanakan di Kejaksaan negeri Kabupaten Balangan. Hal ini berdampak pada aspek sosial masyarakat yang memudahkan masyarakat mendapatkan keadilan hukum tanpa harus menghabiskan banyak biaya dan waktu ke pengadilan di Kejaksaan negeri Kabupaten Balangan yang berada di luar wilayah Kecamatan Juai.

Berdasarkan penjelasan mengenai analisis sosial dan ekonomi dari setiap sub kegiatan dan kebijakan di luar anggaran yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai tahun 2022 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Juai selalu berdampak terhadap masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Juai baik secara sosial (keadaan aman, kondusif dan kemudahan menerima layanan publik) maupun ekonomi (peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas layanan publik).

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2022 penting untuk disusun sebagai dasar penyusunan APBDP Kecamatan Juai Tahun 2022 dimana dokumen tersebut berisi informasi tentang program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatifnya yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan Kecamatan Juai Tahun 2022. Keterbatasan sumber daya pendanaan saat penetapan APBD murni tahun 2022 dapat diatasi dengan adanya penambahan atau pegeseran anggaran pada saat penyusunan APBD Perubahan tahun 2022.

Sebagaimana penganggaran pada APBD murni tahun 2022, pada APBD Perubahan Kecamatan Juai tahun 2022 juga terdapat 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Namun sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa dikarenakan keterbatasan sumber daya pendanaan di APBD murni tahun 2022 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga pada kesempatan penyusunan APBD Perubahan tahun 2022 Kecamatan Juai diberikan penambahan maupun pergeseran anggaran dari sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan ke beberapa sub kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 38.390.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 8.800.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 47.190.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru sebanyak 2 (dua) orang dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September 2022.

#### 2. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.2.284.944.152,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 178.737.201,00

- sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 2.463.681.353,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN atas penambahan pegawai dan kenaikan pembayaran TPP pada Kecamatan Juai.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.72.742.600,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 6.424.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 79.166.600,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran gaji tenaga honorer baru sebanyak 1 (satu) orang dan pembayaran BPJS JKK dan JKM tenaga honorer baru sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
  4. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.46.320.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 11.760.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 58.080.000,00. Adapun alasan penambahan adalah kebutuhan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/workshop/FGD/sosialisasi dan acara sejenis yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Juai.
  5. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.61.500.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 279.500.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 341.000.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya keperluan untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa pengadaan mobil dinas camat, meja layanan terpadu dan sebuah LCD proyektor.
  6. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 39.886.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 27.189.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 67.075.000,00. Adapun alasan penambahan

adalah adanya kebutuhan penambahan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti rapat koordinasi/konsultasi/sosialisasi/seminar dan acara sejenis yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai.

7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 7.200.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 13.200.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 20.400.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru (arsiparis) sebanyak 3 (tiga) orang dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September 2022.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.80.800.000,00 dan dilakukan pengurangan dengan pergeseran anggaran sebesar Rp.2.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 78.800.000,00. Adapun alasan pergeseran adalah adanya kelebihan penganggaran pada akun belanja sumber daya air dan biaya internet namun kekurangan anggaran pada akun belanja listrik.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.36.750.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 66.750.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran BBM dan service mobil dinas camat yang lama.

10. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 42.351.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 20.240.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 62.591.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru sebanyak 4

(empat) orang dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan selama 4 (empat) bulan dan kenaikan gaji 1 (satu) orang tenaga honorer tenaga keamanan terhitung sejak bulan September 2022.

11. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.116.107.300,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 22.716.800,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 138.824.100,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya penambahan kebutuhan atas alat/bahan pelayanan publik dan anggaran makan minum rapat untuk mengakomodir rapat penyusunan laporan hasil SKM dan rapat lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Juai .

12. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.10.897.200,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 22.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 32.897.200,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru sebanyak 5 (lima) orang dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan selama 4 (empat) terhitung sejak bulan September 2022.

13. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.43.200.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 13.200.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 56.400.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru sebanyak 3 (tiga) orang dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan selama 4 (empat) terhitung sejak bulan September 2022.

14. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.222.035.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 9.376.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 231.411.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru sebanyak 1 (satu) orang dengan pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan selama 4 (empat) terhitung sejak bulan September 2022 serta perlunya penambahan dana untuk belanja makanan dan minuman rapat pelaksanaan kegiatan.

15. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.53.519.800,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 13.900.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 67.419.800,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru sebanyak 2 (dua) orang dengan pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan selama 4 (empat) terhitung sejak bulan September 2022 serta perlunya penambahan dana untuk belanja perjalanan dinas dalam kota/kabupaten dalam rangka pelaksanaan beserta konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

16. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.12.089.800,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 8.800.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 20.889.800,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru sebanyak 2 (dua) orang dengan pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan selama 4 (empat) terhitung sejak bulan September 2022.

Alokasi anggaran pada APBD perubahan tahun 2022 pada Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022**

SKPD : KECAMATAN JUAI

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	66.5 nilai	66.5 nilai	2.762.760.252	2.995.610.453	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	<b>6 dokumen</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>46.596.700</b>	<b>55.396.700</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	38.390.000	47.190.000	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	3.066.700	3.066.700	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	5.140.000	5.140.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan waktu pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	2.284.944.152	2.463.681.353	Penambahan jumlah ASN, akomodir kenaikan pembayaran TPP
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan waktu pembayaran honorarium sesuai dengan beban kerja	12 Bulan	12 Bulan	72.742.600	79.166.600	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru da JKK JKM honorer baru
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>46.320.000</b>	<b>58.080.000</b>	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	15 Orang/perjalanan	15 Orang/perjalanan	46.320.000	58.080.000	Penambahan anggaran SPPD luar daerah
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>136.055.800</b>	<b>442.744.800</b>	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.270.000	6.270.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100%	100%	61.500.000	341.000.000	Penambahan anggaran pengadaan mobil dinas camat, LCD proyektor dan meja layanan terpadu



9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan waktu penyediaan Barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	28.399.800	28.399.800	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	39.886.000	67.075.000	Penambahan anggaran SPPD luar daerah
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>97.000.000</b>	<b>108.200.000</b>	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	7.200.000	20.400.000	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	80.800.000	78.800.000	Pergeseran lebih anggaran air dan internet, penambahan anggaran listrik
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	9.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>79.101.000</b>	<b>129.341.000</b>	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	12 Bulan	36750000	66.750.000	Penambahan BBM dan servis mobil dinas camat yang lama
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	42.351.000	62.591.000	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru, kenaikan gaji tenaga keamanan lama
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>116.107.300</b>	<b>138.824.100</b>	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>116.107.300</b>	<b>138.824.100</b>	
16	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan	100%	100%	116.107.300	138.824.100	Penaman bahan belanja bahan pelayanan dan makan minum rapat
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.897.200</b>	<b>32.897.200</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.897.200</b>	<b>32.897.200</b>	
17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.897.200	32.897.200	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>43.200.000</b>	<b>56.400.000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>43.200.000</b>	<b>56.400.000</b>	
18	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan	100%	100%	43.200.000	56.400.000	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>222.035.000</b>	<b>231.411.000</b>	

	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>222.035.000</b>	<b>231.411.000</b>	
19	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	222.035.000	231.411.000	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru, penambahan belanja makan minum rapat
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>323.609.600</b>	<b>346.309.600</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>323.609.600</b>	<b>346.309.600</b>	
20	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap	100%	100%	53.519.800	67.419.800	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru, penambahan SPPD dalam daerah
21	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	100%	100%	258.000.000	258.000.000	
23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu	100%	100%	12.089.800	20.889.800	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer baru
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>					<b>3.478.609.352</b>	<b>4.142.452.353</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini tentunya dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam membuat rencana kegiatan berikutnya. Dan merupakan bahan evaluasi dalam pembuatan rencana kerja anggaranperubahan tahun 2022, yang dituangkan dalam DPA-SKPD Kecamatan Juai.

Dengan adanya program dan kegiatan di atas diharapkan dapat mewujudkan visi misi SKPD Kecamatan Juai, diharapkan akhir tahun 2022 evaluasi kinerja berdasarkan Renstra dapat tercapai maksimal menuju target 100%.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) SKPD Kecamatan Juai ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juai,      Agustus 2022

  
Camat,  
**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19800127 200604 1 016



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## KECAMATAN JUAI

Jalan Setia Karsa No. 03 Mungkur Uyam ( 71665 )

### KEPUTUSAN CAMAT JUAI NOMOR 050.11/ /CJ/ 2022

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) KECAMATAN JUAI TAHUN 2022

#### CAMAT JUAI

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Juai Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat JUAI tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Juai Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JUAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)  
KECAMATAN JUAI TAHUN 2022
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat  
Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P)  
Kecamatan Juai Tahun 2022.  
Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Juai Tahun
- KEDUA : 2022 mempunyai tugas Menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan  
(Renja-P) Kecamatan Juai Tahun 2022.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
- KETIGA : maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JUAI  
Pada tanggal : Juni 2022



**NANANG EDWARD, S.Sos., MM.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)  
KECAMATAN JUAI TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	NANANG EDWARD, S.Sos., MM NIP. 19800127 200604 1 016	6Camat	Pengarah
2	ERLIYANTI, SE NIP. 198510202010012031	Sekcam	Koordinator
3	HUJAIMAH, S.Kom NIP.19880212 201001 2 016	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	YANTI MASITAH, S.Sos, M.AP NIP. 196703191987032009	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	DEWI BUDI ASTUTI, S.Pd NIP.19820305201001 2 017	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
6	TRIO FITRIONO, S.Sos NIP. 197410162005011005	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
7	SAMSUL BAKHRI, S.Pd.I NIP. 19831125 200801 1 006	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota

**CAMAT JUAI**  
  
**NANANG EDWARD, S.Sos., MM.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**